



Transformasi Demokrasi Indonesia dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang

Maharani Jasmine Putri Ramdani¹, Amelia Putri Sihombing², Fajrina Fitriani³, Surya Hadi Kusumah⁴, Chiara Khaila Salwa⁵, Wulan Wahyuningsih⁶, Nida Aulia⁷, Alsy Sauzan Noor⁸, Maharani⁹, Dila Siti Nurfatonah¹⁰, Josh Ali Fitriyan¹¹, Koko Adya Winata¹²

¹⁻¹²Fakultas Teknik, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Indonesia

e-mail: ³fajrinaftr@gmail.com, ⁵chiarakhaila44@gmail.com, ⁶wulanwnn13@gmail.com,
¹²adyawinata@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 17, 2026

Revised July 15, 2026

Accepted July 18, 2026

Keywords:

Digital Democracy,
Democratic Transformation,
Political Participation,
Misinformation, Indonesia.

ABSTRACT

The development of digital technology has significantly transformed various aspects of life, including the practice of democracy in Indonesia. This journal discusses the transformation of Indonesian democracy in the digital era by highlighting the challenges and opportunities that arise. By examining the dynamics of political participation, the growth of digital media, and changes in public communication patterns, this paper aims to understand how Indonesian democracy adapts to technological advancements. On the one hand, the digital era provides opportunities for increased public participation, wider access to information, and greater transparency in political life. On the other hand, it also presents challenges such as the spread of misinformation, political polarization, and the decline in the quality of public discourse. Therefore, efforts are needed to strengthen digital literacy and promote more responsible and inclusive democratic practices. This article is expected to provide insights into the future direction of Indonesian democracy in the context of rapid digitalization.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 17, 2026

Revised July 15, 2026

Accepted July 18, 2026

Keywords:

Demokrasi Digital,
Transformasi Demokrasi,
Partisipasi Politik,
Disinformasi, Indonesia

ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik demokrasi di Indonesia. Jurnal ini membahas transformasi demokrasi Indonesia dalam era digital dengan menyoroti berbagai tantangan dan peluang yang muncul. Melalui kajian terhadap dinamika partisipasi politik, perkembangan media digital, serta perubahan pola komunikasi publik, tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana demokrasi Indonesia beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. Di satu sisi, era digital membuka peluang bagi peningkatan partisipasi masyarakat, akses informasi yang lebih luas, serta transparansi dalam kehidupan politik. Namun, di sisi lain, muncul berbagai tantangan seperti penyebaran disinformasi, polarisasi politik, dan menurunnya kualitas diskursus publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat literasi digital serta mendorong praktik demokrasi yang lebih bertanggung jawab dan inklusif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:



Fajrina Fitriani

Fakultas Teknik, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Indonesia

e-mail: fajrinafr@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik demokrasi di Indonesia. Transformasi ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, media sosial, serta berbagai platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses politik. Demokrasi yang sebelumnya bersifat konvensional kini mengalami pergeseran menuju bentuk yang lebih terbuka dan partisipatif melalui ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat praktik demokrasi modern (Rohmatin et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, digitalisasi telah mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam momentum politik seperti pemilu. Media digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait kandidat, kebijakan, maupun proses demokrasi itu sendiri. Selain itu, teknologi digital juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi politik yang efektif antara pemerintah, aktor politik, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui keterlibatan publik yang lebih luas.

Namun demikian, transformasi demokrasi di era digital tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah maraknya penyebaran disinformasi dan hoaks yang dapat memengaruhi opini publik serta mengganggu stabilitas politik. Kemudahan akses informasi tidak selalu diiringi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi tersebut. Akibatnya, ruang digital sering kali dipenuhi oleh informasi yang tidak akurat dan bersifat provokatif, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas diskursus publik (Mudrikah et al., 2024).

Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat. Literasi digital menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas partisipasi politik di era digital. Tanpa kemampuan literasi yang memadai, masyarakat rentan terhadap manipulasi informasi serta propaganda politik yang menyesatkan. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi salah satu kunci dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah arus digitalisasi yang semakin pesat (Bulya & Izzati, 2024).

Di sisi lain, era digital juga membuka peluang besar dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Digitalisasi memungkinkan terciptanya transparansi dalam pemerintahan, memperluas akses informasi publik, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga negara. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan praktik demokrasi yang lebih inklusif karena dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah tanpa batasan ruang dan waktu. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Kholda, Putri, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi demokrasi Indonesia dalam era digital merupakan fenomena yang kompleks dengan berbagai tantangan dan peluang yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana demokrasi Indonesia beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akademik serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi untuk memperkuat praktik demokrasi yang lebih inklusif, kritis, dan bertanggung jawab di era digital.



METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, fenomena, serta perkembangan demokrasi Indonesia di era digital berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai fenomena sosial melalui analisis terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan (Adlini et al., 2022).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah nasional yang membahas transformasi demokrasi, demokrasi digital, literasi digital, partisipasi politik, disinformasi, serta perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar dan berbagai portal jurnal ilmiah nasional dengan mengutamakan artikel yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir agar sesuai dengan perkembangan isu demokrasi digital di Indonesia. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi topik, kredibilitas jurnal, serta keterkaitannya dengan tujuan penelitian (Adlini et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menyeleksi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh literatur dianalisis secara kritis untuk memperoleh informasi yang valid mengenai transformasi demokrasi di era digital, tantangan yang dihadapi, peluang yang muncul, serta peran literasi digital dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan mengelompokkan, membandingkan, menginterpretasikan, serta menyintesis berbagai temuan dari penelitian terdahulu sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai transformasi demokrasi Indonesia di era digital. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antara perkembangan teknologi digital, tantangan demokrasi, peluang penguatan demokrasi digital, serta pentingnya literasi digital dalam mendukung demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Demokrasi di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Kehadiran internet dan media sosial membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi politik, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi yang sebelumnya berlangsung melalui media konvensional kini berkembang ke ruang digital yang lebih terbuka, cepat, dan interaktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital memberikan peluang dalam memperluas partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi muda yang aktif menggunakan media sosial.

Transformasi demokrasi di era digital ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, sebagai sarana komunikasi politik dan partisipasi masyarakat. Perkembangan internet telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta berinteraksi dengan pemerintah maupun aktor politik. Jika sebelumnya komunikasi politik lebih banyak berlangsung melalui media konvensional, kini masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam berbagai diskusi publik melalui platform digital. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital telah menggeser praktik demokrasi menuju sistem yang lebih terbuka, interaktif, dan partisipatif.



Media digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang publik digital (*digital public sphere*) yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Berbagai platform media sosial dimanfaatkan oleh pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat, hingga warga negara sebagai media komunikasi politik yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui pemanfaatan media sosial, *e-government*, dan berbagai platform komunikasi berbasis internet. Kondisi tersebut memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses politik sekaligus mendorong terciptanya demokrasi yang lebih inklusif dan transparan (Elizamiharti, 2024).

Selain meningkatkan partisipasi politik, transformasi demokrasi di era digital juga mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penyampaian informasi publik menjadi lebih cepat, terbuka, dan mudah diakses sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah secara real time. Di sisi lain, pemerintah juga memperoleh ruang untuk menerima masukan, kritik, maupun aspirasi masyarakat secara langsung melalui berbagai platform digital. Pola komunikasi yang lebih interaktif tersebut menunjukkan adanya perubahan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang sebelumnya bersifat satu arah menjadi komunikasi yang lebih kolaboratif. Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya penerapan layanan pemerintahan berbasis digital (*e-government*) yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.

Transformasi demokrasi digital juga memberikan dampak terhadap meningkatnya kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan kelompok pengguna internet terbesar di Indonesia. Kemudahan mengakses informasi politik melalui media digital mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengikuti perkembangan isu-isu publik, berpartisipasi dalam diskusi politik, serta terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi politik, seperti kampanye digital, petisi daring, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital telah memperluas ruang partisipasi masyarakat dan memperkuat prinsip demokrasi yang menempatkan warga negara sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan publik.

Meskipun demikian, transformasi demokrasi di era digital juga membawa konsekuensi yang perlu mendapat perhatian. Kemudahan dalam memproduksi dan menyebarkan informasi menyebabkan ruang digital menjadi sangat dinamis, namun juga rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, pembentukan opini yang bersifat emosional, serta munculnya polarisasi di masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital, etika komunikasi, serta kemampuan berpikir kritis agar masyarakat mampu memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, transformasi demokrasi di era digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.

Selain itu, perkembangan demokrasi digital juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemanfaatan internet dan berbagai platform digital memungkinkan informasi publik disampaikan secara lebih cepat, luas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Perubahan tersebut menciptakan mekanisme komunikasi yang sebelumnya bersifat satu arah menjadi komunikasi yang lebih interaktif, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pihak yang dapat memberikan tanggapan, kritik, maupun masukan terhadap berbagai



kebijakan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui proses komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Di samping itu, perkembangan teknologi digital juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai layanan publik berbasis digital (*e-government*) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kebijakan, program pembangunan, maupun pelayanan publik. Kemudahan akses tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi penyampaian informasi, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dengan adanya ruang komunikasi digital yang semakin terbuka, pemerintah dituntut untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga proses pengambilan kebijakan menjadi lebih demokratis. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi digital telah membawa perubahan pada praktik pemerintahan menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada partisipasi publik.(Fernandes et al., 2023).

Namun demikian, transformasi demokrasi di era digital juga menghadirkan berbagai tantangan. Kemudahan akses informasi sering kali disertai dengan meningkatnya penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian di media sosial. Informasi yang tidak terverifikasi dapat memengaruhi opini publik serta memicu polarisasi politik dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan demokrasi digital perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, transformasi demokrasi di era digital menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki peran penting dalam memperluas partisipasi politik, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi digital juga harus disertai dengan kesadaran kritis dan etika bermedia agar demokrasi digital dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Tantangan Demokrasi di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Kemajuan internet dan media sosial telah memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik melalui kemudahan akses informasi, penyampaian aspirasi, serta interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan peluang bagi terciptanya demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif. Namun, di sisi lain, keterbukaan ruang digital juga menghadirkan berbagai tantangan yang semakin kompleks. Arus informasi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi informasi, sehingga ruang digital menjadi rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat dan manipulatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mengubah pola komunikasi politik, tetapi juga memengaruhi kualitas proses demokrasi di Indonesia.

Salah satu tantangan utama dalam demokrasi digital adalah meningkatnya polarisasi politik di media sosial. Algoritma media sosial dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna sehingga masyarakat cenderung memperoleh informasi yang sejalan dengan pandangan politiknya. Fenomena ini dikenal sebagai *echo chamber* dan *filter bubble*, yaitu kondisi ketika pengguna hanya terpapar pada informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri dan semakin jarang menerima sudut pandang yang berbeda. Akibatnya, ruang dialog publik menjadi semakin sempit, perbedaan pendapat sulit dijumpai, dan konflik sosial di masyarakat berpotensi meningkat. Penelitian mengenai algoritma media sosial dan demokrasi digital menunjukkan bahwa mekanisme tersebut berkontribusi terhadap



meningkatnya polarisasi politik serta menurunkan kualitas diskusi publik di ruang digital (Amri & Yandri, 2025).

Selain polarisasi politik, meningkatnya penyebaran hoaks dan disinformasi juga menjadi tantangan serius bagi demokrasi di era digital. Kemudahan masyarakat dalam memproduksi dan menyebarkan informasi melalui media sosial menyebabkan informasi yang belum terverifikasi dapat tersebar dengan sangat cepat. Dalam konteks politik, penyebaran disinformasi sering dimanfaatkan untuk membangun opini publik, memengaruhi preferensi politik masyarakat, bahkan memperuncing konflik antarkelompok. Fenomena tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dan mengganggu proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang valid. Penelitian mengenai disinformasi pada Pilkada menunjukkan bahwa hoaks dan ujaran kebencian di media sosial menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas demokrasi karena mampu memperkuat polarisasi politik di masyarakat (Firdaus & Hasbullah, 2022).

Penelitian dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menjelaskan bahwa media sosial berperan besar dalam membentuk polarisasi politik melalui fenomena selective exposure dan filter bubble. Pengguna media sosial lebih sering mengonsumsi informasi yang sesuai dengan keyakinan politik mereka dan cenderung menghindari informasi yang berbeda pandangan. Hal ini menyebabkan meningkatnya konflik dan perpecahan sosial di ruang digital. (Sopani, 2022).

Selain polarisasi politik, tantangan demokrasi di era digital juga ditandai dengan maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi. Informasi yang tidak terverifikasi dapat dengan mudah tersebar luas melalui media sosial dan memengaruhi opini publik. Penyebaran hoaks sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu sehingga dapat menurunkan kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* dijelaskan bahwa hoaks dan disinformasi menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ketahanan demokrasi di Indonesia karena mampu memperburuk polarisasi politik di Masyarakat. (Sarjito, 2024).

Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak. Banyak pengguna media digital yang belum memiliki kemampuan kritis dalam memilah dan mengevaluasi informasi yang diterima. Akibatnya, masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi provokatif dan berita palsu yang beredar di internet. Penelitian dalam *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* menjelaskan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam menghadapi penyebaran hoaks di era digital. Rendahnya kemampuan literasi digital menyebabkan masyarakat kesulitan membedakan informasi valid dan tidak valid. (Sopani, 2022).

Selain itu, perkembangan demokrasi digital juga menimbulkan tantangan dalam aspek etika komunikasi. Media sosial sering digunakan sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian, propaganda politik, dan konflik antar kelompok masyarakat. Penggunaan media digital tanpa etika dapat mengurangi kualitas demokrasi dan menghambat terciptanya ruang publik yang sehat. Penelitian dalam *Jurnal Adhyasta Pemilu* menjelaskan bahwa berkembangnya media sosial di era post-truth menyebabkan masyarakat semakin sulit membedakan fakta dan opini, sehingga demokrasi rentan dipengaruhi oleh informasi yang manipulatif. (Evanalia, 2022).

Dengan demikian, tantangan demokrasi di era digital tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan tersebut. Polarisasi politik, penyebaran hoaks, rendahnya literasi digital, serta lemahnya etika komunikasi menjadi tantangan utama yang perlu diatasi agar demokrasi digital di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.



Peran Literasi Digital Dalam Demokrasi

Literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kualitas demokrasi di era digital. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, memverifikasi, serta memanfaatkan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Dalam konteks demokrasi, kemampuan tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat dihadapkan pada arus informasi yang sangat cepat melalui berbagai platform digital. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk mampu membedakan informasi yang berbasis fakta dengan informasi yang mengandung hoaks, disinformasi, maupun propaganda politik sehingga keputusan politik yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain kemampuan teknis dalam memanfaatkan teknologi digital, pembentukan karakter, nilai-nilai kebangsaan, sikap toleransi, serta tanggung jawab sebagai warga negara juga menjadi aspek penting dalam membangun masyarakat yang mampu berpartisipasi secara bijaksana di ruang digital. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut sehingga masyarakat tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi (Winata et al., 2020).

Perkembangan media digital telah memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen dan penyebar informasi melalui berbagai platform media sosial. Kondisi tersebut memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan partisipasi politik, namun juga menghadirkan risiko apabila masyarakat belum memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Rendahnya kemampuan dalam mengevaluasi informasi dapat menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif dan memperburuk kualitas diskusi publik dalam demokrasi. (Khatimah et al., 2024) menjelaskan bahwa media sosial memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat, tetapi pada saat yang sama diperlukan penguatan literasi digital agar masyarakat mampu memitigasi dampak negatif berupa hoaks, disinformasi, dan polarisasi opini yang berkembang di ruang digital.

Selain berfungsi sebagai kemampuan teknis, literasi digital juga berperan dalam membentuk budaya demokrasi yang sehat melalui penguatan kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab, serta etika dalam menggunakan media digital. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital yang baik cenderung lebih mampu mengevaluasi kebenaran suatu informasi, terbuka terhadap berbagai sudut pandang, serta tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, disinformasi, maupun ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik sosial. Kemampuan tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan ruang publik digital yang inklusif, menghargai keberagaman pendapat, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih rasional dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi teknologi masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran etis dalam berkomunikasi sehingga ruang digital dapat berkembang menjadi lingkungan yang sehat, bertanggung jawab, dan mendukung kualitas demokrasi (Nurjannah et al., 2026).

Dengan demikian, penguatan literasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan literasi digital secara berkelanjutan, peningkatan kemampuan berpikir kritis, serta pembiasaan etika dalam bermedia digital. Melalui langkah tersebut, literasi digital diharapkan mampu menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab sehingga demokrasi



Indonesia dapat berkembang secara lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan (Tanjung et al., 2024)

Perkembangan media digital yang sangat cepat menyebabkan arus informasi semakin sulit dikendalikan. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan media digital. Penelitian dalam Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora menjelaskan bahwa literasi digital menjadi pilar penting dalam demokrasi digital karena mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta membantu masyarakat menghadapi disinformasi di era perkembangan teknologi (Nasuha, 2024).

Selain itu, literasi digital juga berperan dalam membentuk sikap masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pengguna media digital yang memiliki tingkat literasi yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan lebih mampu menjaga etika komunikasi di ruang digital. Dalam Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar dijelaskan bahwa penguatan literasi digital dapat membantu membangun karakter masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital serta mampu menghadapi dampak negatif perkembangan teknologi informasi (Agrini & Agustin, 2022).

Peran literasi digital juga terlihat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Masyarakat yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik akan lebih mudah memahami isu-isu politik dan sosial yang berkembang di media digital. Hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam diskusi publik maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian dalam FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik menunjukkan bahwa literasi digital memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi politik masyarakat di era digital, khususnya dalam konteks pemilihan umum dan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi politik. (Berek & Ridwan, 2024).

Namun demikian, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat masih menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi secara kritis sehingga lebih rentan terhadap hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, maupun konten yang bersifat provokatif. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas partisipasi politik serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, platform digital, dan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membangun budaya bermedia yang bertanggung jawab, serta menciptakan ruang demokrasi digital yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan (Rahman et al., 2025).

Peluang Penguatan Demokrasi Digital

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Kehadiran internet dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah berpartisipasi dalam kehidupan politik dan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Demokrasi digital membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara masyarakat dan pemerintah sehingga proses demokrasi menjadi lebih partisipatif, transparan, dan interaktif. Melalui media digital, masyarakat dapat mengakses informasi politik dengan lebih cepat serta ikut terlibat dalam diskusi publik tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Penelitian dalam Journal of Government and Civil Society menjelaskan bahwa demokrasi digital memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam partisipasi politik melalui penggunaan teknologi digital seperti media sosial, e-government, dan



komunikasi publik berbasis internet. Demokrasi digital juga dinilai mampu mendorong sistem demokrasi yang lebih deliberatif dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat (Arizabal et al., 2023).

Selain itu, perkembangan demokrasi digital juga memberikan peluang dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Teknologi digital mempermudah masyarakat untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan memperoleh akses terhadap informasi publik secara lebih cepat. Kondisi tersebut dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi dijelaskan bahwa media sosial dan teknologi digital mampu memperkuat partisipasi politik masyarakat serta meningkatkan keterbukaan informasi dalam sistem demokrasi modern (Elizamiharti, 2024).

Dengan demikian, penguatan literasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan literasi digital secara berkelanjutan, peningkatan kemampuan berpikir kritis, serta pembiasaan etika dalam bermedia digital. Melalui langkah tersebut, literasi digital diharapkan mampu menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab sehingga demokrasi Indonesia dapat berkembang secara lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan (Taryat & Nurwathi, 2021).

Selain itu, demokrasi digital juga memberikan peluang dalam menciptakan ruang publik yang lebih inklusif. Perkembangan teknologi digital memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah geografis untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui berbagai platform digital. Kehadiran media sosial, forum diskusi daring, serta layanan pemerintahan berbasis digital membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan terhadap kebijakan publik, serta terlibat dalam pengambilan keputusan secara lebih terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital mampu memperluas akses partisipasi publik dan memperkuat prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Selain itu, ruang publik digital juga mendorong terciptanya komunikasi yang lebih inklusif antara pemerintah dan masyarakat sehingga proses demokrasi menjadi lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik (Fitriani et al., 2023).

Dengan demikian, perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam memperkuat demokrasi di Indonesia melalui peningkatan partisipasi politik, transparansi pemerintahan, serta keterlibatan masyarakat dalam ruang publik digital. Namun, pemanfaatan teknologi digital tetap perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital dan etika bermedia agar demokrasi digital dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Transformasi demokrasi di era digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang mendasar terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Kehadiran internet, media sosial, serta berbagai platform digital telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi politik, menyampaikan aspirasi, berdiskusi, serta berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses demokrasi. Digitalisasi juga mendorong terciptanya komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki potensi besar dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui peningkatan partisipasi politik, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas pemerintahan.



Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa literasi digital merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan transformasi demokrasi di era digital. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, memverifikasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital yang baik akan lebih mampu berpartisipasi secara rasional dalam kehidupan demokrasi, menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan, serta berkontribusi dalam membangun ruang publik digital yang sehat, inklusif, dan demokratis.

Selain itu, berbagai peluang yang dihadirkan oleh demokrasi digital perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi politik, partisipasi publik, transparansi pemerintahan, serta pengembangan layanan e-government menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, keberhasilan pemanfaatan peluang tersebut memerlukan dukungan kebijakan yang adaptif, infrastruktur digital yang merata, serta peningkatan kompetensi digital masyarakat agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa transformasi demokrasi di era digital merupakan sebuah proses yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Keberhasilan transformasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem demokrasi digital yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, platform digital, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat literasi digital, meningkatkan etika bermedia, serta mendorong partisipasi publik yang berkualitas. Dengan demikian, demokrasi digital di Indonesia diharapkan mampu berkembang menjadi sistem demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, transparan, adaptif, dan berkelanjutan sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi sekaligus memperkuat kehidupan demokrasi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. 6(1), 974–980.
- Agrini, M., & Agustin, F. T. (2022). *Membangun Karakter Bangsa Melalui Literasi Digital*. 1(c), 153–163.
- Amri, Y., & Yandri, L. I. (2025). *Algoritma media sosial dan polarisasi politik dalam demokrasi digital di indonesia*. 4(1), 78–84.
- Arizabal, F. D., Aspa, A. V., Manalo, J. J., Ahmad, M. Z., Atmojo, M. E., Darumurti, A., Hanif, N. A., Ahmad, S., Khaldun, I., Basri, S., Chumaedi, A., Ali, M., Jailani, M. A., Eko, R., Setiawan, B., & Kurniawan, C. (2023). *Civil Society*. 7, 1–158.
- Berek, P. F. V. B., & Ridwan. (2024). *Analisis Tren Penelitian Literasi Digital Dalam Konteks Pemilihan Umum*. 9(2).
- Bulya, B., & Izzati, S. (2024). *Indonesian's Digital Literacy as a Challenge for Democracy in the Digital Age*. 8(148), 640–661. <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n2.p640-661>
- Elizamiharti. (2024). *Demokrasi Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik*. 2(01), 61–72.



- Evanalia, S. (2022). *Peran Jurnalisme Media Sosial dalam Mewujudkan Demokrasi Indonesia di Era Post Truth*. 5(1), 32–43.
- Fernandes, R., Ananda, A., Montessori, M., Putra, E. V., & Tiara, M. (2023). *Efektivitas Pendidikan Pemilih Intrakurikuler Dalam Mata Pelajaran Sosiologi Untuk Membentuk Ketahanan Demokrasi (Studi Pada Siswa SMAN 7 Sekolah Penggerak , Kota Padang , Sumatra Barat)*. 29(1), 18–36.
- Firdaus, sikma umbara tirda, & Hasbullah, H. (2022). *ISSN Online : 25412213 ISSN OFline : 25026984 Jurnal Aspirasi (JAPRI) Volum 6 Nomor 2 ISSN Online : 25412213 ISSN OFline : 25026984 Jurnal Aspirasi (JAPRI) Volum 6 Nomor 2*. 27–37.
- Fitriani, D., Budiyan, Y., Rahayu, A., & Choerunissa, M. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia : Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial*. 1(4), 362–371.
- Khatimah, K., Selvia, V., Sugiyarti, A., Gilang, M., Luthfi, M., & Putra, S. (2024). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik dan Demokrasi di Indonesia*. 7, 128–143.
- Kholda, Daniah; Putri, P. J. (2024). *Demokrasi Dan Perkembangannya Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) : Wacana Digitalisasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2024*. 1(2023), 37–45.
- Mudrikah, A., Jayanti, E. F., Setiaulia, T. C., & Rian, T. A. (2024). *Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Digital*. 4.
- Nasuha, C. N. (2024). *Literasi Digital Sebagai Pilar Demokrasi Digital : Membangun Kesadaran Politik Masyarakat Di Era Disrupsi Teknologi*. 9(November 2025), 2188–2195.
- Nurjannah, Q. A., Rahmawati, V., Rizqi, M. H., & Winata, K. A. (2026). *Reaktualisasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Penguatan Etika Publik di Era Digital*. 03(01), 2424–2437.
- Rahman, M., Putra, S., & Maulana, A. (2025). *Public Policy Literasi Digital dan Kewarganegaraan Aktif : Memperkuat Demokrasi Partisipatif di Media Sosial*. 2(2), 156–170.
- Rohmatin, Z., Taufiq, A. M., Nurmadina, N. A., & Rizqullah, R. (2024). *Pentingnya Pendidikan Demokrasi di Indonesia dalam Menghadapi Era Digital*. 4.
- Sarjito, A. (2024). *Hoaks , Disinformasi , dan Ketahanan Nasional : Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia*. 175–186.
- Sopani, I. (2022). *Literasi Digital dalam Menghadapi Hoaks di Masa Pandemi*. 9(1), 36–44. <https://doi.org/10.33603/deiksis.v9i1.6238>
- Tanjung, A. Q., Suciptaningsih, O. A., & Asikin, N. (2024). *Urgensi Etika dalam Literasi Digital di Era Globalisasi*.
- Taryat, T., & Nurwathi, N. (2021). *Perancangan Mesin Perajang Singkong Yang Ergonomis Menggunakan Data Antropometri. Rekayasa Industri Dan Mesin (ReTIMS)*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.32897/retims.2020.2.1.1052>
- Winata, K. A., Sudrajat, T., Yuniarsih, Y., & Zaqiah, Q. Y. (2020). *Kata Kunci*: 8(2), 98–110.